

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SATPOL P3KP KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA PEKALONGAN
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Kami telah berupaya secara optimal menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam peraturan di atas, namun kami menyadari belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka semua masukan serta saran yang konstruktif sangat kami nantikan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan tahun yang akan datang

Pekalongan, 20 Februari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
Kota Pekalongan



SRIYANA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680709 199003 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan pada tahun 2024 memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan total 3 (tiga) indikator kinerja, dan 3 (tiga) target kinerja yang harus dicapai.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan pada tahun 2024 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2024.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 74,50.

Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2024 nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar 74,25 dengan predikat B. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 99,66%.

2. Indikator persentase penanganan bencana kebakaran target yang ditetapkan 100%.

Indikator ini dicapai dengan menghitung Jumlah bencana kebakaran yang ditangani dibanding jumlah bencana kebakaran, selama tahun 2024 terjadi kebakaran sebanyak 69 kali dan jumlah kebakaran yang tertangani juga sebanyak 69 kali, sehingga tercapai 100%.

3. Indikator persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM dengan target yang telah ditetapkan adalah 85% dan realisasi 90,74% maka capaian indikator adalah 106,75%. Indikator ini dicapai dengan menghitung rata-rata dari capaian persentase jumlah kebutuhan SOP, Jenis Sarpras Satpol PP, Jumlah anggota Satpol PP dan Salinmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan jumlah warga negara yang terkena dampak akibat pelaksanaan penegakan Perda.

Kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar Rp 12.720.482.844,- atau 96,68% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 13.157.628.000,-.

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	3
1.3 KONDISI APARATUR	6
1.4 ISU STRATEGIS	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026	10
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 – 2026	15
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 PENGUKURAN KINERJA	19
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	22
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	37
BAB IV PENUTUP	42
LAMPIRAN	
Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2021 - 2026	
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden tersebut, yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sehingga ruang lingkup penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta revaluasi dan evaluasi kinerja. Dengan demikian akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi instansi pemerintah secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Revaluasi, yang merupakan pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan sebagaimana institusi pemerintahan daerah lainnya, mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sedangkan untuk proses evaluasi terhadap SAKIP, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Maksud penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan adalah sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian Indikator Kinerja Utama dengan target yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota pekalongan untuk meningkatkan kinerjanya, serta untuk mewujudkan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan yang akuntabel, bekerja secara efisien, efektif dan representatif.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan (Satpol P3KP) merupakan institusi pemerintah yang bertugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Satpol P3KP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Satpol P3KP mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

1. Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

- b. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- c. penyelenggaraan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah
- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan
- h. penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran
- i. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP)
- j. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

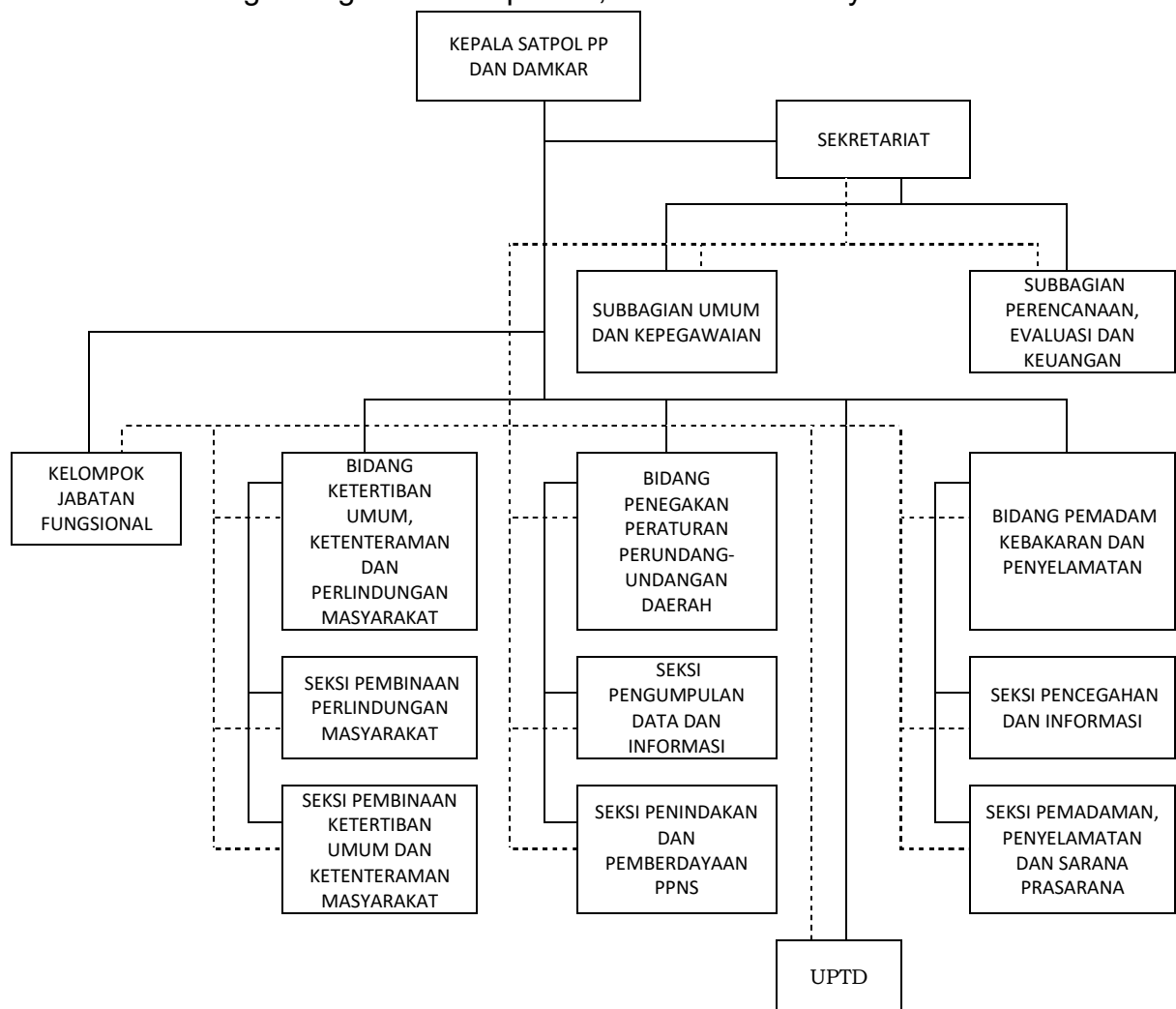
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam susunan organisasi dibawah ini:

- a. Kepala Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- b. Sekretariat
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat
 - 1. Seksi Pembinaan Perlindungan Masyarakat
 - 2. Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

- d. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
 - 1. Seksi Pengumpulan Data dan Informasi
 - 2. Seksi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS
- e. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - 1. Seksi Pencegahan dan Informasi
 - 2. Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana
- f. UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Bagan Organisasi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan



1.3 KONDISI APARATUR

1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Satpol P3KP Kota Pekalongan per 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 178 orang terdiri dari 36 orang PNS, 4 orang PPPK dan 138 orang Non PNS. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan diuraikan sebagai berikut:

1) Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai Satpol P3KP Kota Pekalongan berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1

Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Satpol P3KP Kota Pekalongan

No	Bidang	Pendidikan (Orang)							Total (Orang)
		SD	SLTP	SLTA	Sarjana Muda	S-1	S-2	S-3	
1	Sekretariat			7		8	1		16
2	Ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	2	3	88	9	13	1		116
3	Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah			3		3	2		8
4	Pemadam kebakaran dan penyelamatan	1	6	24	1	4	2		38
Jumlah (Orang)		3	9	122	10	28	6		178
Persentase (%)		2,3	4,9	68,54	5,4	15,7	3,2		100

2) Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di Satpol P3KP Kota Pekalongan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Satpol P3KP Kota Pekalongan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Bidang	Jenis Kelamin (Orang)		Total (Orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekretariat	5	11	16
2	Ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	112	4	116
3	Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	5	3	8
4	Pemadam kebakaran dan penyelamatan	33	5	38
Total (orang)		156	22	178
Persentase (%)		87,64	12,36	100

3) Pegawai berdasarkan golongan

Komposisi pegawai di Satpol P3KP Kota Pekalongan berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Satpol P3KP Kota Pekalongan
Berdasarkan Golongan

No	Bidang	Golongan				PPPK	Non PNS	Total (Orang)
		I	II	III	IV			
1	Sekretariat	0	1	2	2	0	11	16
2	Ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	1	10	4	1	0	100	116
3	Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	0	0	1	2	0	5	8
4	Pemadam kebakaran dan penyelamatan	1	5	7	0	4	21	38
Total (orang)		2	16	14	5	4	137	178
Persentase (%)		1,12	8,98	8,2	2,8	7,86	76,97	100

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol P3KP Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Satpol P3KP Kota Pekalongan
Tahun 2024

No	Sarpras	Jumlah	Satuan
1	Dump Truck	1	Unit
2	Dalmas Truck	2	Unit
3	Kendaraan Roda 4	15	Unit
4	Kendaraan Damkar	4	Unit
5	Kendaraan Roda 3	3	Unit
6	Kendaraan Roda 2	13	Unit
7	Sepeda	5	Unit
8	Perahu	2	Unit
9	Mesin Komresor	1	Unit
10	Mesin Pemotong Plat	2	Unit
11	Perkakas kontruksi	2	Unit
12	Peralatan Las	1	Unit
13	Scanner	1	Unit

No	Sarpras	Jumlah	Satuan
14	Standar Test Gauge	3	Unit
15	Meisn ketik manual	3	Unit
16	Lemari Besi	9	Unit
17	Lemari Kayu	20	Unit
18	Filling Cabinet Besi	64	Unit
19	Brandkas	1	Unit
20	Lemari Kaca	7	Unit
21	CCTV	78	Unit
22	Mesin Absensi	9	Unit
23	LCD Proyektor	2	Unit
24	Papan Nama Instansi	1	Unit
25	Papan Pengumuman	3	Unit
26	Peralatan Damkar	76	Unit
27	Meja Kayu	41	Unit
28	Kursi Besi	3	Unit
29	Meja rapat	87	Unit
30	Velbed	78	Unit

1.4 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
2. Masih adanya gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
3. Masih minimnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Belum maksimalnya koordinasi yang terpadu antara Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum di Kota Pekalongan;

5. Masih adanya permasalahan ketentraman dan ketertiban yang tidak mempunyai payung hukum dalam penindakannya;
6. Masih munculnya respon negatif terhadap kinerja Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di masyarakat;
7. Makin terbukanya gerbang informasi melalui berbagai media yang menyebabkan terjadinya perubahan pola cara pandang masyarakat dalam menyikapi sesuatu perubahan terutama informasi-informasi negatif yang merusak norma, agama dan budaya;
8. Belum maksimalnya pembinaan dan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM personil Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan PPNS maupun Damkar sesuai dengan pelaksanaan tugasnya.
9. Belum lengkapnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan dokumen Renstra Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut

atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/ *deployment*/cascading dari program serta tugas dan fungsi Satpol P3KP Kota Pekalongan.

Tabel 2.1. Matriks Perencanaan Kinerja pada
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Tahun 2024

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan	Indikator	Target 2024
VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius		
Misi Ke-6 : Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah		
Tujuan Kota : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan		
Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 : Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum	Tingkat ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen
Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 : Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	85 Persen
Program Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 : Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	82 Persen
Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	95 Persen
Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2 : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	20 Perda
Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,67 Indeks
Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	74,50 Indeks

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan	Indikator	Target 2024
Program Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen
Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen
Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3 : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	16 Persen
Program Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen
Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen
Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen
Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
Program Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen
Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan	Indikator	Target 2024
Pemerintahan Daerah	Daerah	
Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2 : Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	100 Persen
Program Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 : Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen
Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran	100 persen
Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2 : Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya	100 Persen
Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3 : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran	100 persen
Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 4 : Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase penanganan kondisi membahayakan	100 Persen

Sumber : Satpol P3KP Kota Pekalongan 2024, diolah

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama Satpol P3KP Kota Pekalongan disajikan pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Target Sasaran Kinerja Satpol P3KP Kota Pekalongan
Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Nilai SAKIP OPD	Inspektorat
2	Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	Persentase penanganan bencana kebakaran	Satpol P3KP
3	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	Persen	Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	Satpol P3KP

Sumber: Satpol P3KP Kota Pekalongan 2024

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Satpol P3KP Kota Pekalongan sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Target Sasaran Kinerja Satpol P3KP Kota Pekalongan
Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	70	71,50	73	74,50	75	75,50
2	Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	Persen	50	60	70	85	95	100

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

**Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Satpol P3KP Kota Pekalongan**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	2024		
			Satuan	Target	
Tujuan:					
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,53
2	Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum		Tingkat ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100
Sasaran:					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP OPD	Indeks	74,50
2	Meningkatnya penanganan bencana kebakaran		Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	100
3	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum		Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	Persen	85

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.558.043.000,-	APBD
Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 1.012.225.000,-	APBD
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 6.587.360.000,-	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Satpol P3KP Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satpol P3KP Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

- **Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya**
Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.
- **Arahan Operasional**
Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.
- **Akuntabilitas**
Membantu untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.
- **Perencanaan**
Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.
- **Pengelolaan**
Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.
- **Penganggaran**
Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.
- **Penyediaan pelayanan kepada pihak luar**
Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

➤ Pengawasan Kerja

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Capaian Anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Penyimpulan capaian sasaran ditetapkan Nilai Mean setiap kategori sebagai berikut :

Sangat Berhasil	:	95
Berhasil	:	82.5
Cukup Berhasil	:	70
Tidak Berhasil	:	57.5
Sangat Tidak Berhasil	:	25

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean}}{\text{jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	74,50	74,25	99,66	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	100	100	100	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	Persen	85	90,74	106,75	Sangat Berhasil

Sumber : Satpol P3KP Kota Pekalongan 2024

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) target capaian dengan realisasi diatas 100% dan 1 (satu)

capaian target indikator capaian dibawah 100%. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 2 (dua) target, sebagai berikut:
 - a. Target meningkatnya penanganan bencana kebakaran dengan indicator persentase penanganan bencana kebakaran ditargetkan 100 persen tercapai 100 persen (sangat berhasil). Capaian tersebut didapatkan dari jumlah kejadian kebakaran 69 kali dan semuanya dapat ditangani oleh pemadam kebakaran.
 - b. Target kinerja meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan indicator persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM ditargetkan 85 persen dan tercapai 90,74 persen, maka tingkat capaian 106,75 persen (sangat berhasil). Capaian tersebut didapatkan dari menghitung jumlah SOP, sarpras berdasarkan SPM, Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP, dan pelayanan kepada warga yang terdampak penegakan Perda.
2. Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 1 (satu) target yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP OPD ditargetkan 74,50 dengan realisasi nilai 74,25 atau 99,66 persen (sangat berhasil).

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tersaji dalam tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama
Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	72,47	73,80	74,00	74,25	▲
2	Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	100	100	100	100	●
3	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	Persen	-	82,41	82,41	90,74	▲

Sumber: Satpol P3KP Kota Pekalongan 2024

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Dokumen Rencana Strategis atau Renstra di dalamnya memuat target kinerja termasuk indikator kinerja utama. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada dokumen renstra adalah sebagaimana tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama
Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2024 dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2024	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	74,25	75,50	98,34	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	100	100	100	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	Persen	90,74	100	90,74	Sangat Berhasil

Sumber : Satpol P3KP Kota Pekalongan 2024

Realisasi capaian kinerja utama Satpol P3KP Tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir Renstra, untuk indikator sasaran nilai SAKIP OPD tercapai 98,34 persen (sangat berhasil), indikator sasaran persentase ketenteraman dan ketertiban umum tercapai 90,74% (sangat berhasil). Sedangkan indikator kinerja sasaran persentase pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM dibandingkan dengan target akhir Renstra sudah tercapai sesuai target yaitu 100 persen.

3.2.2. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Capaian Kinerja Tujuan
Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,53	89,68	103,64	Sangat Berhasil
2	Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum	Tingkat ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator kinerja tujuan, disimpulkan bahwa 2 indikator rata-rata tercapai 101,82% dikategorikan “Sangat Berhasil”.

3.2.3. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran, dapat dianalisis masing-masing sasaran berdasarkan target dan realisasi kinerjanya. Adapun analisis capaian kinerja sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
							Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD		Indeks	72,47	73,80	74,00	74,50	74,25	99,66	75,50

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas

kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2024. Hasil evaluasi AKIP Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2024 memperoleh nilai 74,25 atau predikat “Sangat Baik”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Satpol P3KP Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Rincian Hasil Evaluasi AKIP Satpol P3KP
Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,80
2	Pengukuran Kinerja	30	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15	11,10
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	18,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	74,25
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB (Sangat Baik)	

Tabel 3.7 Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2024	Predikat
1	BAPPEDA	88,50	A
2	DINKOMINFO	83,40	A
3	DLH	85,45	A
4	DINDAGKOP-UKM	85,75	A
5	INSPEKTORAT DAERAH	84,60	A
6	DPUPR	81,25	A
7	BPKAD	84,50	A
8	DPMPPA	82,75	A
9	DKP	83,25	A

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2024	Predikat
10	BKPSDM	83,20	A
11	DISDUKCAPIL	82,90	A
12	DINKES	83,20	A
13	SETDA	81,50	A
14	DINDIK	78,45	BB
15	DINPARBUDPORA	77,55	BB
16	DPMPTSP	77,90	BB
17	DINHUB	77,15	BB
18	DINPERPA	76,10	BB
19	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	77,00	BB
20	DINARPUS	75,45	BB
21	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	76,15	BB
22	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	76,10	BB
23	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	76,25	BB
24	BPBD	75,45	BB
25	DINPERINAKER	75,45	BB
26	DINSOS P2KB	75,90	BB
27	DINPERKIM	74,75	BB
28	SATPOL P3KP	74,25	BB
29	SEKRETARIAT DPRD	75,15	BB
30	BADAN KESABNGPOL	73,45	BB

Sumber: Inspektorat 2024

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Sasaran 1 Tahun 2024

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran Penetapan 2024 (Rp)	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.960.000,00	15.960.000,00	14.400.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.837.103.000,00	4.730.987.000,00	4.425.802.454,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.720.000,00	248.720.000,00	242.034.279,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.651.000,00	127.651.000,00	116.088.061,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	456.725.000,00	429.725.000,00	392.934.416,00
TOTAL		5.679.159.000,00	5.558.043.000,00	5.196.259.210,00

Sumber : Satpol P3KP 2024

Tingkat keberhasilan target capaian kinerja dan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1 terhadap Anggaran Tahun 2024

No.	Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	5.558.043.000,00	5.196.259.210,00	90,23	99,66	10,45

Sumber : Satpol P3KP 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi anggaran yang mendukung sasaran 1 sebesar 90,23%. Apabila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja sasaran sebesar 99,66% maka terdapat efisiensi sumber daya sebesar $(99,66/90,23) - 1 \times 100\% = 10,45\%$. Pencapaian indikator sasaran 1 ini didukung melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah dengan target 100% dan terealisasi 100% sehingga capainnya 100%.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target 100% dan terealisasi 100% maka capaian 100%.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator persentase ketrcapaian administrasi umum perangkat daerah dengan target 100% dan terealisasi 100,52%.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 100% dan teralisasi 100%.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Panunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan target 100% dan terealisasi 100%.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP;
- Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;
- Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.

SASARAN 2 : Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 1 indikator kinerja yaitu persentase penanganan bencana kebakaran dengan target 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian sebesar 100% yang berdasarkan skala ordinal termasuk kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.10 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
							Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase Penanganan Bencana Kebakaran		Persen	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol P3KP 2024

Indikator sasaran 2 meningkatnya penanganan bencana kebakaran dihitung dengan formulasi jumlah bencana kebakaran yang ditangani dibagi jumlah kejadian bencana kebakaran x 100%. Capaian jumlah kejadian kebakaran yang ditangani tahun 2024 sejumlah 69 kejadian, sesuai dengan kebakaran yang terjadi ditahun 2024. Capaian kinerja sasaran 2 didukung oleh program, kegiatan dan anggaran yang dapat dilihat pada tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel 3.11 Program, Kegiatan dan Anggaran yang Mendukung Sasaran 2 Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran Penetapan 2024 (Rp)	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Pencegahan, Penanggulangan , Penyelamatan	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan,	924.473.000,00	826.313.000,00	820.992.756,00

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran Penetapan 2024 (Rp)	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)
Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	34.071.000,00	34.071.000,00	34.071.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	97.328.000,00	97.328.000,00	95.737.600,00
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	54.513.000,00	54.513.000,00	54.513.000,00
TOTAL		1.110.385.000,00	1.012.225.000,00	1.005.314.356,00

Sumber : Satpol P3KP 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pencapaian kinerja sasaran 2 meningkatnya penanganan bencana kebakaran didukung oleh program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dengan 4 (empat) kegiatan dan jumlah anggaran Rp.1.110.385.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.012.225.000,00 atau 99,32%. Tingkat pencapaian kinerja sasaran 2 juga didukung oleh adanya efisiensi sumber daya sebagaimana tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2 terhadap Anggaran Tahun 2024

No.	Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	1.012.225.000,00	1.005.314.356,00	99,32	100	0,68

Sumber : Satpol P3KP 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi anggaran yang mendukung sasaran 2 sebesar 99,32%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator sasaran sebesar 100% maka terdapat efisiensi sumber daya sebesar $(100/99,32) - 1 \times 100\% = 0,68\%$. Pencapaian indikator sasaran 2 didukung melalui program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dan 4 kegiatan yaitu:

- a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran dengan target 100% dan terealisasi 100% sehingga capain 100%.
- b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran dengan indikator persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya dengan target 100% dan terealisasi 100%.
- c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan indikator persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran dengan target 100% dan terealisasi 100%.
- d. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia dengan target persentase penanganan kondisi membahayakan dengan target 100% dan terealisasi 100%.

Faktor-faktor yang mendukung tercapainya kinerja sasaran 2

antara lain:

1. Kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan piket sangat penting untuk menghadapi kejadian kebakaran.
2. Kerja sama pemadam kebakaran dan relawan pemadam kebakaran mempercepat informasi dan penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran yang terjadi
3. Keterampilan petugas damkar dalam mengatasi kebakaran dan non kebakaran.

SASARAN 3 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 1 indikator kinerja yaitu persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM dengan target 85% dan terealisasi 90,74% sehingga capaian sebesar 106,75% yang berdasarkan skala ordinal termasuk kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.13 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
							Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM		Persen	50	60	82,41	85	90,74	106,75	100

Sumber : Satpol P3KP 2024

Indikator sasaran 3 meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dicapai dengan menghitung rata-rata dari capaian persentase jumlah kebutuhan SOP, Jenis Sarpras Satpol PP, Jumlah anggota Satpol PP dan Salinmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan jumlah warga negara yang terkena dampak akibat pelaksanaan penegakan Perda. SOP yang disusun dibagi jumlah kebutuhan SOP sesuai tugas Satpol (6/6) 100%, jenis sarpras yang ada dibagi jenis kebutuhan sarpras berdasarkan SPM (17/27) 62,96%, jumlah anggota satpol pp dan satlinmas ton inti yang mendapatkan peningkatan kapasitas dibagi jumlah anggota Satpol PP dan satlinmas ton inti (155/155) 100% dan

jumlah warga terdampak (0/0) 100% sehingga total $362,96/4 = 90,74\%$.
 Capaian kinerja sasaran 3 didukung oleh program, kegiatan dan anggaran yang dapat dilihat pada tabel 3.14 sebagai berikut:

Tabel 3.14 Program, Kegiatan dan Anggaran yang Mendukung Sasaran 3 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran Penetapan 2024 (Rp)	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	2.526.535.000,00	2.492.736.000,00	2.479.627.000,00
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4.117.694.000,00	4.092.693.000,00	4.037.351.278,00
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	14.651.000,00	1.931.000,00	1.931.000,00
TOTAL		6.658.880.000,00	6.587.360.000,00	6.518.909.278,00

Sumber : Satpol P3KP 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pencapaian kinerja sasaran 3 meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum didukung oleh program ketentraman dan ketertiban umum dengan 3 (tiga) kegiatan dan jumlah anggaran Rp. 6.587.360.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.518.909.278,00 atau 98,96%. Tingkat pencapaian kinerja sasaran 3 juga didukung oleh adanya efisiensi sumber daya sebagaimana tabel 3.15 berikut:

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3 terhadap Anggaran Tahun 2024

No.	Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.587.360.000,00	6.518.909.278,00	98,96	106,75	7,87

Sumber : Satpol P3KP 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi anggaran yang mendukung sasaran 3 sebesar 98,96%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator sasaran sebesar 106,75% maka terdapat efisiensi sumber daya sebesar $(106,75/98,96) - 1 \times 100\% = 7,87\%$. Pencapaian indikator sasaran 3 didukung melalui program ketentraman dan ketertiban umum dan 3 kegiatan yaitu:

- a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dengan indikator persentase penanganan gangguan trantibum dengan target 95% dan terealisasi 100% dengan tingkat capaian 105,26%. Pada tahun 2024, semua laporan pengaduan masyarakat terkait gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Perda dan Perkada yaitu sebanyak 2.743 laporan dapat ditindaklanjuti secara keseluruhan sehingga realisasi 100%.
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indikator jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan dengan target 20 Perda dan terealisasi 16 Perda dan tingkat capaian 80%. Target Perda yang menjadi prioritas penegakkan Perda oleh Satpol PP sejumlah 20 Perda, tetapi selama tahun berjalan berdasarkan laporan masyarakat Satpol PP melaksanakan penanganan aduan sesuai Perda sejumlah 16 Perda.
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota dengan indikator persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS dimana target 16% sedangkan realisasi

8,70% sehingga capaian 54,35%. Capaian indikator kegiatan ini tidak dapat tercapai karena terbatasnya jumlah PPNS Polisi Pamong Praja di Kota Pekalongan. Jumlah PPNS Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan sampai dengan akhir tahun 2024 hanya 2 orang dibanding jumlah PNS Satpol PP sejumlah 23 orang maka realisasi hanya 8,70%.

Faktor-faktor yang mendukung tercapainya kinerja sasaran 3 antara lain:

1. Kelengkapan dokumen SOP Satpol PP;
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana Satpol PP yang baik;
3. Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas;
4. Terjalannya koordinasi yang baik antara Satpol PP dan instansi terkait (TNI dan Polri).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional pada tabel berikut:

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Satpol P3KP Kota Pekalongan dengan Standar Nasional Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Target Nasional	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	74,25	-	-	-
2	Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	100	-	-	-
3	Meningkatnya penanganan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	90,74	-	-	-

Sumber: Satpol P3KP Kota Pekalongan, 2024 diolah

Indikator nilai SAKIP OPD, Persentase penanganan bencana

kebakaran dan persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum merupakan indikator kinerja mandiri Satpol P3KP Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.

Pencapaian rata-rata untuk sasaran kinerja 1, sasaran kinerja 2 dan sasaran kinerja 3 adalah sebesar 102,14%. Sedangkan capaian keuangan yang mendukung sasaran kinerja tersebut sebesar 96,68%, sehingga dapat diperoleh efisiensi $(102,14/96,68) - 1 \times 100\% = 5,64\%$.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2024 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Satpol P3KP Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah sebesar Rp.13.157.628.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 12.720.482.844,00 atau sebesar 96,68%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.17
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal (Rp.)	%
1	2	3	4	5
SATPOL P3KP				
A	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pemadam Kebakaran	13.157.628.000,00	12.720.482.844,00	96,68
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.558.043.000,00	5.196.259.210,00	93,49
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	15.960.000,00	14.400.000,00	90,23

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Daerah			
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2.320.000,00	2.320.000,00	100
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1.640.000,00	1.640.000,00	100
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	10.440.000,00	87
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.730.987.000,00	4.425.802.454,00	93,55
1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	4.669.367.000,00	4.364.732.454,00	93,48
2	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.100.000,00	59.550.000,00	99,08
3	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.520.000,00	1.520.000,00	100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	100
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.720.000,00	242.034.279,00	97,31
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.625.000,00	5.486.000,00	97,53
2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	29.195.000,00	28.634.000,00	98,08
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000,00	7.499.000,00	99,99
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.400.000,00	90.516.500,00	93,90
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	7.499.750,00	100
6	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	2.500.000,00	2.400.000,00	96
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	99.999.029,00	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.651.000,00	116.088.061,00	90,94
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	125.651.000,00	114.088.061,00	90,80
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	429.725.000,00	392.934.416,00	91,44

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	369.230.000,00	336.009.416,00	91
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.495.000,00	29.970.000,00	98,28
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	26.955.000,00	89,85
II	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.587.360.000,00	6.518.909.278,00	98,96
1	Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.492.736.000,00	2.479.627.000,00	99,47
1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1.976.146.000,00	1.974.621.000,00	99,92
2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	102.270.000,00	101.021.000,00	98,78
3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	21.100.000,00	21.090.000,00	99,95
4	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	123.500.000,00	123.500.000,00	100
5	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	43.000.000,00	42.990.000,00	99,98
6	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	213.480.000,00	213.165.000,00	99,85
7	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan	13.240.000,00	3.240.000,00	24,47

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Daerah dan Perkada			
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4.092.693.000,00	4.037.351.278,00	98,65
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	51.699.000,00	50.754.000,00	98,17
2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4.025.994.000,00	3.972.197.278,00	98,66
3	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	15.000.000,00	14.400.000,00	96
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1.931.000,00	1.931.000,00	100
1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	1.931.000,00	1.931.000,00	100
III	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.012.225.000,00	1.005.314.356,00	99,32
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	826.313.000,00	820.992.756,00	99,36
1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.750.000,00	24.300.000,00	98,18
2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	734.013.000,00	729.461.056,00	99,38
3	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	15.000.000,00	15.000.000,00	100
4	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	7.500.000,00	7.450.000,00	99,33
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	11.250.000,00	11.007.000,00	97,84
6	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	33.800.000,00	33.774.700,00	99,93

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	34.071.000,00	34.071.000,00	100
1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	34.071.000,00	34.071.000,00	100
3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	97.328.000,00	95.737.600,00	98,37
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	37.500.000,00	37.240.000,00	99,31
2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	59.828.000,00	58.497.600,00	97,78
4	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	54.513.000,00	54.513.000,00	100
1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada peristiwa yang Menimpa, Membahayakan dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	54.513.000,00	54.513.000,00	100

Sumber: Satpol P3KP Kota Pekalongan, 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2024. Penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan tahun 2021-2026, pada tahun 2024 telah menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator nilai SAKIP OPD dengan target 74,50 dan realisasi 74,25 maka capaiannya adalah 99,66%.
2. Sasaran 2 meningkatnya penanganan bencana kebakaran terdiri dari 1 indikator, yaitu persentase penanganan bencana kebakaran dengan realisasi 100% dan target 100% maka capaian kinerja 100%.
3. Sasaran 3 meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum terdiri dari 1 indikator, yaitu persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM dengan realiasi 90,74 dimana target 85 maka tingkat capaian 106,75%.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Satpol P3KP Kota Pekalongan pada Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah dicapai dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 13.157.628.000,00 (tiga belas miliar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.720.482.844,00 (dua belas miliar tujuh ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) atau sekitar 96,68%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 SiLPA Satpol P3KP Kota Pekalongan sebesar Rp. 437.145.156,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh enam rupiah) atau sekitar 3,32%, telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan 2021-2026.

Pagu belanja Satpol P3KP Kota Pekalongan diluar belanja gaji dan tunjangan tahun 2024 sebesar Rp. 7.599.585.000,00 (tujuh miliar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 7.524.223.634,00 (tujuh miliar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh dua tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) atau 99,01%.

Berdasarkan hasil realisasi kinerja sasaran dan keuangan dibandingkan target kinerja tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa Satpol P3KP Kota Pekalongan efisien mengelola anggaran dalam mewujudkan target kinerja sasaran dengan tingkat efisiensinya adalah $(102,13/96,68) - 1 \times 100\% = 5,64\%$.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satpol P3KP Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Satpol P3KP Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif dalam membangun Kota Pekalongan.

Untuk lebih meningkatkan kinerja Satpol P3KP Kota Pekalongan serta langkah ke depan sebagai upaya meningkatkan kinerja guna mencapai visi dan misi Kepala Daerah 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka beberapa strategi peningkatan kinerja yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan pelayanan;
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparaturnya terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, serta pemadaman kebakaran;
3. Mengoptimalkan penegakan dan penanganan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
4. Mengoptimalkan pelayanan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran;
5. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi secara rutin;
6. Mengoptimalkan peran dan kinerja PPNS;
7. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (TNI dan Polri);
8. Mengaktifkan kembali partisipasi dan peran Kader Siaga Trantib (KST);

Pencapaian target terhadap beberapa indikator sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Kinerja Satpol P3KP yang sudah baik diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan, agar kinerja di masa yang akan datang dapat lebih baik lagi.

Pekalongan, 20 Februari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan
Kota Pekalongan



SRIYANA, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19680709 199003 1 008

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU PERUBAHAN)
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Tipe Indikator	Kondisi Awal	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	65,48	70,00	71,50	73,00	74,50	75,00	75,50	Inspektorat Daerah	Satpol P3KP
2	Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	Jumlah bencana kebakaran yang ditangani dibagi jumlah bencana kebakaran dikali 100 %	Pembilang Penyebut/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 100	100	100	100	100	100	100	100	Satpol P3KP	Satpol P3KP
3	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	Persen	Jumlah persentase (SOP yang disusun dibagi jumlah kebutuhan SOP sesuai tugas Satpol, jenis sarpras yang ada dibagi jenis kebutuhan sarpras berdasarkan SPM, jumlah anggota Satpol P3KP dan Satlinmas ton inti, jumlah warga terdampak (mengalami kerugian materiil dan/ cedera fisik) akibat penegakan hukum perda dan perkara yang mendapatkan ganti rugi dan/ pengobatan dibagi jumlah warga yang terdampak akibat penegakan hukum perda dan perkara) dibagi 4 dikali 100 %	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	-	50	60	70	85	95	100	Satpol P3KP	Satpol P3KP

Pekalongan, 9 Desember 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
Kota Pekalongan



SRIYANA, S.Sos., M.Si.

NIP. 19680709 199003 1 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SRIYANA, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E.**

Jabatan : **Wali Kota Pekalongan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 9 September 2024



Pihak Kedua,

Wali Kota Pekalongan

H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE., MM.

Pihak Pertama,
Kepala Satpol P3KP

SRIYANA, S.Sos., M.Si
NIP. 19680709 199003 1 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Unit Kerja: Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Tujuan :				
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,53	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
2.	Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum	Tingkat ketentraman dan ketertiban umum	100	Formulasi : Jumlah pelanggaran perda, gangguan trantibum, bahaya kebakaran dan non kebakaran yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran perda, gangguan trantibum, bahaya kebakaran dan non kebakaran yang dilaporkan x 100% Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Satpol P3KP
Sasaran :				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	74,50	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	100	Formulasi : jumlah bencana kebakaran yang ditangani dibagi jumlah bencana kebakaran dikali 100 persen Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Satpol P3KP
3.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	85	Formulasi : Persentase (SOP yang disusun dibagi jumlah kebutuhan SOP sesuai tugas Satpol, jenis sarpras yang ada dibagi jenis kebutuhan sarpras berdasarkan SPM, jumlah anggota satpol pp dan satlinmas ton inti

			yang mendapatkan peningkatan kapasitas dibagi jumlah anggota satpol pp dan satlinmas ton inti, jumlah warga terdampak (mengalami kerugian materiil dan / cedera fisik) akibat penegakan hukum perda dan perkara yang mendapatkan ganti rugi dan / pengobatan dibagi jumlah warga yang terdampak akibat penegakan hukum perda dan perkara) /4 x 100% Tipe Capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : Satpol P3KP
--	--	--	---

Program

Anggaran

Keterangan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
3. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Rp. 5.558.043.000,-

APBD-P

Rp. 1.012.225.000,-

APBD-P

Rp. 6.587.360.000,-

APBD-P

Pekalongan, 9 September 2024



Wali Kota Pekalongan

H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE., MM.

Kepala Satpol P3KP

SRIYANA, S.Sos., M.Si
NIP. 19680709 199003 1 008